



Judul : Menanti Arah Fiskal Presiden Prabowo
Tanggal : Jumat, 14 Agustus 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 9

Menanti Arah Fiskal Presiden Prabowo

Nota keuangan diharapkan menjawab sejauh mana pemerintah dapat menjadikannya sebagai Kompas ekspektasi dan persepsi pelaku pasar.

Dimas Waraditya Nugraha

Datas podium Sidang Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan Pidato Kenegaraan Terkait Penyampaian Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya.

Sesi tersebut menjadi puncak dari rangkaian agenda kenegaraan Presiden Prabowo dalam menyambut HUT Ke-81 RI, yang diawali oleh Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI-DPRD RI.

Bagi pasar keuangan dan dunia usaha, momen tahunan ini bukan sekadar rutinitas penyerahan dokumen anggaran. Setelah melalui berbagai gelombang ketidakpastian sepanjang 2026, mulai dari tekanan nilai tukar rupiah, dinamika likuiditas perbankan, hingga penyesuaian biaya pembiayaan, publik tidak lagi sekadar menanti deretan angka target. Pasar menantikan arah dan "kompas" navigasi ekonomi jangka menengah.

Secara formal, penyampaian RUU APBN dan Nota Keuangan oleh RI-1 menjadi penantian awal siklus pembahasan anggaran bersama DPR RI, dengan mempertimbangkan masukan DPD RI, sebelum nantinya disahkan menjadi undang-undang.

Secara teknis, petunjuk arah awal APBN 2027 sebenarnya telah dipetakan sejak Presiden menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) pada 20 Mei 2026, yang kemudian disepakati bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR pada Juli lalu.

Dalam kesepakatan pendanaan tersebut, asumsi pertumbuhan ekonomi 2027 dipatok pada kisaran 5,8-6,5 persen, dengan inflasi 1,5-3,5 persen, serta nilai tukar rupiah di rentang Rp 16.800-Rp 17.500 per dolar AS.

Sementara itu, defisit anggaran dirancang pada kisaran 1,8-2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), kendati Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sempat memberikan sinyal realisasinya berpotensi bergerak mendekati batas atas 2,4 persen PDB seiring dengan besarnya kebutuhan akselerasi.

Namun, sebagaimana diungkapkan Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Ekhnul Fuhian dalam keterangan tertulisnya, daya tarik utama pidato Presiden tahun

ini terletak pada narasi besar yang melandasinya. Investor global kini tidak lagi hanya membaca APBN secara terisolasi, tetapi melihat neraca nasional (*national balance sheet*) secara utuh.

Menurut dia, pasar tidak kekurangan data, tetapi para pelaku pasar justru membutuhkan arah. Apa yang ditunggu dari Pidato Nota Keuangan adalah bagaimana Presiden mampu menjelaskan hubungan antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, pembiayaan pembangunan, dan strategi eksternal Indonesia dalam satu kerangka yang utuh.

"Perhatian investor kemungkinan akan lebih tertuju pada narasi kebijakan yang disampaikan Presiden dibandingkan sekadar parameter angka-angka dalam RAPBN 2027," ujarnya.

Di tengah lanskap global yang diwarnai tingginya biaya pembiayaan (*cost of capital*), keberhasilan memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif menjadi tantangan nyata. Nota Keuangan diharapkan akan menjawab sejauh mana pemerintah mampu menjadikannya panduan ekspektasi yang mampu menenangkan dan memandu persepsi pelaku pasar.

Menanti kejutan

Di luar kalkulasi rasio fiskal, publik dan pelaku pasar juga menanti kejutan terkait arsitektur kebijakan yang akan dibawa Presiden Prabowo. Pengalaman pada Nota Keuangan dan RAPBN 2026 memberikan pelajaran penting mengenai betapa besarnya dampak perubahan desain anggaran terhadap daerah dan dunia usaha.

Kala itu, pemerintah mendesain belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD) sebagai satu kesatuan utuh. Realisasinya, postur TKD pada APBN 2026 dipangkas drastis menjadi sekitar Rp 650 triliun, turun hingga 24,7 persen (setara Rp 269 triliun) dibandingkan dengan alokasi APBN 2025 yang mencapai Rp 919,87 triliun.

Kebijakan efisiensi tersebut sempat memicu guncangan pada dana perimbangan di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota. Publik pun menanti apakah pola efisiensi radikal ini akan berlanjut atau direkalibrasi pada 2027. Di sisi lain, hawa spekulasi yang sempat mengiringi penyusunan RAPBN 2027 mulai mereda setelah Kementerian Keuangan menepis dua isu krusial yang sempat beredar: bahwa pemerintah berencana menghapus batas defisit

APBN sebesar 3 persen PDB yang diatur dalam UU Keuangan Negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tetap memegang teguh prinsip kehati-hatian fiskal (*fiscal prudence*).

"Tidak ada niat seperti itu (menghapus batas defisit). Bahkan, Presiden amat *firm* dengan menjalankan fiskal sesuai dengan aturan kehati-hatian," ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (5/8).

Kedua, menanggapi isu liar di media sosial mengenai wacana penempatan Bank Indonesia di bawah struktur eksekutif atau kementerian, Purbaya meluruskan bahwa hal tersebut sekadar aspirasi diskusi di legislatif mengenai mekanisme pengawasan, tanpa merusak independensi bank sentral yang dilindungi undang-undang sejak 1999.

Kendati demikian, batas defisit 1,8-2,4 persen PDB untuk 2027 bukanlah tanpa ujian riil. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendi Manilet, menilai target tersebut tampak *prudent* di atas kertas, tetapi kredibilitasnya sangat ditentukan oleh kondisi fiskal berjalan.

Pemerintah memproyeksikan defisit APBN 2026 melebar menjadi 2,85 persen PDB dari target awal 2,68 persen, terutama akibat lonjakan beban subsidi dan kompensasi hingga 44,4 persen (menjadi Rp 233 triliun) pada semester I-2026.

Menurut Yusuf, menurunkan defisit dari posisi 2,85 persen menuju di bawah 2,4 persen pada 2027, sambil tetap menopang program prioritas, membutuhkan pilihan berat. Pemerintah harus memilih antara mendorong penerimaan secara agresif atau melakukan efisiensi belanja secara signifikan.

Di sisi penerimaan, pertumbuhan pajak 24,6 persen pada semester I-2026 memang sinyal positif, tetapi sulit dipertahankan pada tingkat yang sama sehingga risiko *shortfall* tetap harus diantisipasi. "Ruang fiskal riil untuk membiayai program baru sebenarnya lebih sempit dari yang terlihat," ucap Yusuf.

Membagi beban

Untuk menopang delapan kluster program kerja prioritas nasional 2027, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi, hilirisasi, perumahan, hingga penurunan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen, APBN dipastikan tidak bisa berjalan sendirian.

Pasar kini mencermati pembagian peran *role sharing* yang presisi antara APBN, BUMN, instrumen investasi Danantara, dan sektor

keuangan swasta. Langkah Kementerian Keuangan yang mulai mematok sebagian dividen BUMN sebagai cadangan APBN tahun ini menjadi salah satu sinyal konsolidasi neraca negara tersebut di tengah sorotan lonjakan utang pemerintah.

Penataan kembali juga menyasar program unggulan seperti Mekanisme Bergizi Gratis (MBG). Setelah alokasi MBG 2026 dipangkas dari Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun, Banggar DPR memproyeksikan anggaran MBG 2027 bergerak lebih rasional di kisaran Rp 174 triliun.

Penurunan ini sejalan dengan penyesuaian jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SLPG) ke rentang realistis 21.000 titik (dari rencana awal 27.000 titik) serta penajaman sasaran penerima manfaat.

Yusuf menilai penyesuaian ini sebagai langkah konsolidasi fiskal yang krusial. Dengan anggaran MBG yang lebih terkendali, tekanan terhadap defisit dan kebutuhan pembiayaan utang menjadi lebih kecil untuk menjaga ruang fiskal serta beban bunga jangka menengah.

"Jika MBG tetap dipakaskan di atas Rp 200 triliun, risiko pelebaran defisit makin besar," ujarnya.

Apalagi, pemerintah harus bersiap memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan anggaran MBG dari anggaran pendidikan paling lambat pada APBN 2028.

Belanja produktif

Di luar persoalan efisiensi pembiayaan, sisi mendasak lainnya adalah memastikan APBN dialokasikan untuk belanja yang benar-benar produktif.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufikurrahman, menegaskan pentingnya pemerintah menunjukkan mesin penggerak pertumbuhan ekonomi yang riil dan jelas ketimbang sekadar menawarkan target angka yang tinggi. Capaian target tersebut membutuhkan strategi memadai untuk memperkuat daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja formal, dan menopang industri padat karya yang tengah dilanda gelombang PHK.

Lebih dari sekadar penstabil jangka pendek, APBN 2027 diharapkan menjadi alat pencipta kapasitas ekonomi jangka panjang melalui pengalihan anggaran pada industrialisasi manufaktur, industri investasi dengan UMKM lokal, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta perlindungan sosial yang presisi.